

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Referensi

- Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia, 2020, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- K.C Wheare, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern: Modern Constitutions*, Nusa Media, Bandung.
- Mahfud, Moh, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isra, Saldi dan Feri Amsari, "Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim," *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2019.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI dan M. Ali Syafa'at, dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi / Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2020, Jakarta.
- Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dkk., 2010, *Hasil Penelitian Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan TIK, 2016, *Laporan Hasil Penelitian: Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2023, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan.
- Tim Penulis PNB, 2020, *Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebuah Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dr. Mukhti Fajar Nur Dewata dan MH Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA, 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Buku VII, Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Kementerian Keuangan RI, 2023, *Tonggak Awal Anggaran Negara Berdaulat - Nota Keuangan 1950 dan 1951*, Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan Pustaka KSP Kreatif.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1954, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Aziz, H. Machmud, 2008, *Laporan Penulisan Karya Ilmiah tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dampaknya Terhadap Pembentukan, Jenis, dan Tata Susunan (Hierarki) Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Round Table Conference, 1949, *Round Table Conference : Results as Accepted in the Second Plenary Meeting Held on 2 November 1949 in the Ridderzal at The Hague*, The Hague : Secretariat General of the Round Table Conference.

Kementerian Keuangan, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Saidi, Muhammad Djafar dan Rohana Huseng, 2010, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Jurnal/Artikel/Makalah/Tesis/Disertasi

Maruarar Siahaan, "Hak Konstitusional dalam UUD 1945," *elsam.or.id*, 2011.

Ahmad, Panji Mulkillah, 2021, *Interpretasi Frasa Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak," Universitas Muhammadiyah Magelang *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol. 4, No. 2, 2011.

Iskandar, Agus, "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia," *Keadilan Progresif*, Vol. 11, No. 2, Maret, 2021.

Ditisrama, Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, dan Ismail Ismail Ismail, "Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia," *Syntax Idea*, Vol. 4, No. 6, Juni, 2022.

Annafi, Bahrul Ulum, "Evaluasi Kinerja Pendapatan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Usaha Meningkatkan Kemandirian Daerah," *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Vol. Edisi 01, Agustus, 2020.

Khensani Richard Chauke, "The Benefit Theory of Taxation and Its Implications on the South African Indigent Households," *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 6, No. 10, Oktober, 2023.

Saifudin, "Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945," *Unisia*, No. 49, Juli, 2016.

Putro, Widhi Setyo, "Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949: Wujud Konsensus Nasional antara Republik Indonesia dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg," Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3, No. 1, Maret, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konsitusi Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pinjaman Darurat sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955 tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Website

Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>, diakses 23 Januari 2024.

KPMI.FH, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/>, diakses 7 Mei 2024.

Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, diakses 30 Mei 2024.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat - Wikisumber bahasa Indonesia, https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Republik_Indonesia_Serikat, diakses 30 Mei 2024.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 - Ensiklopedia, [https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia_\(UUDS\)_1950](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia_(UUDS)_1950), diakses 1 Juni 2024.
